

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada mengenai Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program keluarga harapan di Desa Wue dilaksanakan sejak tahun 2015, jumlah penerima PKH di Desa Wue Tahun 2019 sebanyak 33 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2020 sebanyak 32 Kepala Keluarga (KK). Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bidang pendidikan dan Kesehatan. Secara umum pelaksanaan PKH di Desa Wue sudah mengalami peningkatan di aspek ekonomi, namun belum sepenuhnya. Karena ada Keluarga penerima PKH yang menggunakan bantuan PKH tidak tepat sasaran.
2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wue sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai hasil atau tujuan dari pelaksanaan PKH dikarenakan program ini masih belum tepat sasaran dalam menggunakan bantuan yang diberikan dan masih ditemukan kendala di lapangan seperti, Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai, pola pikir yang masih menggunakan bantuan untuk keperluan konsumtif, adanya miskomunikasi, sarana dan prasarana belum memadai dan belum mampu mengoperasikan ATM.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan memberi sosialisasi kepada peserta PKH sehingga akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi dari pemerintah harus lebih dikedatkan untuk bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi.
2. Bagi pendamping PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat agar dana yang diterima dari program keluarga harapan bisa digunakan sesuai ketentuan program keluarga harapan baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta program keluarga harapan.
3. Bagi peserta PKH harus memahami secara benar program ini sehingga dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ada dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Todaro. 2003. Pembangunan Ekonomi di dunia. Erlangga: Jakarta.
- Wrihatnolo. 2002. Manajemen Pemberdayaan. Gramedia: Jakarta.
- Aziz, Abdul. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Vol 3, Nomor 1/Juni 2013
- Tlolean, Yudid.2014. Implementasi PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Vol , Nomor 1/Juli 2014
- Usman, Claudio.2014. Efektivitas PKH dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Vol 4 Nomor 2/Oktober 2014
- Patinama. 2009. Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Loka. Vol, 13 No. 1, Juli 2009: 1-12
- Tlonaen, Yudid B. S. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3 (1), 29-37.
- A, Wahdaniah. 2021. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid-19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers : Jakarta
- Gaffar Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar
- Supralan. 1993. Kemiskinan di Perkotaan, Cetakan ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Edwar III . 1980. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI : Bandung
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Usman, Nuridin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum: Bintang Pustaka, Yogyakarta.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Dewanti, Ajeng Kusuma. 2012. Iplementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Sasmito, Cahyo. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. Journal of Public Sector Innovation. Vol. 3, No. 2. Tahun 2019. Hal

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumlah Kemiskinan, di akses pada tanggal 4 maret 2022

Pedoman pelaksanaan Program keluarga Harapan tahun 2021

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Peremsos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.

<http://ewalmart.blogspot.com/2013/05/indikator-indikator-kemiskinan-sumber.html>

<http://rekrutmen.pkh.kemsos.go.id/tentang-pkh/apa-itu-pkh>

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh>).